

Dialog

Vol. 36, No. 2, November 2012

Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan

Terakreditasi C No: 362/AU1/P2MBI/07/2011
ISSN : 0126-396X

PEMIMPIN UMUM:
Prof. Dr. H. Machasin, M.A.

PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB
Sekretaris Badan Litbang dan Diklat
Dr. H. M. Hamdar Arraiyyah, M.Ag.

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI
Kepala Bagian Umum dan Perpustakaan
Drs. H. A.M. Khaolani, M.Pd.

SEKRETARIS REDAKSI
Astuty Nilawati, S.Pd.

MITRA BESTARI (PEER REVIEW)
Prof. Dr. H. Komaruddin Hidayat, M.A. (Filsafat Agama)
Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A. (Tafsir)
Prof. Dr. H. Masykuri Abdillah, M.A. (Hukum Islam)
Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar (Hukum Islam)

DEWAN REDAKSI (EDITORIAL BOARD)
Prof. Dr. H. Abdurrahman Mas'ud (Sejarah dan Kebudayaan Islam)
Prof. Dr. H. Abdul Aziz al-Bone (Pendidikan Islam)
Dr. H. Imam Tolkhah (Sosiologi Agama)
Drs. Choirul Fuad Yusuf, S.S, M.A. (Lektur Keagamaan)
Drs. H. Muhammad Shohib, M.A. (Tashih al-Qur'an)
H. Chamdi Pamudji, S.H., M.M. (Pendidikan dan Pelatihan)
Drs. H. Praptono Zamzam, M.Sc. (Pendidikan dan Pelatihan)

REDAKTUR EKSEKUTIF
Dr. H. Susari, M.A.

REDAKTUR PELAKSANA (MANAGING EDITOR)
H. Sahlani, B.A.
Reza Perwira, S.Th.I.
Sofyan Yamin, S.Si.
Rahmatillah Amin, S.Kom
Wawan Hermawan, S.Kom

ALAMAT REDAKSI
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama
Gedung Kementerian Agama Jl. M.H. Thamrin No.6 Jakarta Pusat
Telp (021) 31924509 pes.277/271 fax.(021) 3920380

WEBSITE:
www.balitbangdiklat.kemenag.go.id

Jurnal Dialog diterbitkan satu tahun dua kali, pada bulan Juni dan Desember oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Sebagai media informasi dalam rangka mengembangkan penelitian dan kajian keagamaan di Indonesia. Dialog berisi tulisan ilmiah dan hasil penelitian dan pengembangan terkait dengan masalah sosial keagamaan. Redaksi mengundang para peneliti agama, cendekiawan dan akademisi, untuk berdiskusi dan menulis secara kreatif demi pengembangan penelitian maupun kajian keagamaan di Indonesia dalam jurnal ini.



PENGANTAR REDAKSI







DAFTAR ISI

ISSN : 0126-396X

Jurnal DIALOG
Vol.36, No.2, November 2012

HERDI SAHRASAD

Agama dan Masalah Korupsi : Sebuah Catatan: 1-18

IYOH MASTIYAH

Relasi Jender dalam Perspektif Pesantren: 19-30

NURUDIN

Pendidikan Karakter Berbasis Nilai Kemanusiaan: Ikhtiar Mengatasi Konflik Sosial-Keagamaan di Indonesia: 31-44

SYAHRUL KIROM

Pancasila dalam Bingkai Kerukunan Beragama : 45-64

ALI USMAN

Menguji Efektivitas Kurikulum Pendidikan Antikorupsi di Indonesia : 65-80

ARIEF SUBHAN

Mencari Perspektif Terorisme di Indonesia: Kajian Awal : 81-94

SYARIPULLOH

Penanggulangan Kemiskinan : 95-112

SUDIRMAN TEBBA

Pergeseran Konflik Sosial Keagamaan di Indonesia : 113-126

SUPRAPTO

Paradigma Baru Kediklatan (Penyelenggaraan Diklat Jarak Jauh pada Balai Diklat Keagamaan Padang : 127-148

BOOK REVIEW

AKMAL SALIM RUHANA

Terorisme [sama dengan] Jihad? : 149-166

KUMPULAN ABSTRAK 167-172

INDEKS PENULIS 173-174

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

OLEH: SYARIPULLOH *)

ABSTRACT

Kemiskinan merupakan salah satu isu pembangunan yang sangat kompleks. Kemiskinan dipandang sebagai dampak ikutan dari pembangunan dan bagian dari masalah dalam pembangunan. Keberadaan kemiskinan ditandai dengan adanya pengangguran, keterbelakangan, dan ketimpangan antar wilayah.

Kemiskinan juga ditunjukkan dengan adanya permukiman-permukiman kumuh dan liar, serta adanya golongan masyarakat yang masuk kategori keluarga miskin yang disebabkan oleh keterbatasan ekonomi, sosial dan politik dari masing-masing keluarga miskin tersebut. Fenomena ini ditunjukkan dengan adanya beberapa kepala keluarga yang secara ekonomi tidak dapat memenuhi kebutuhan primer anggota keluarganya. Selain itu, tingkat pendidikan masyarakat juga rendah sehingga mereka sulit memperoleh pekerjaan dengan hasil yang memadai atau mencukupi kebutuhan keluarganya. Terdapat pula sejumlah keluarga yang tingkat kesehatannya rendah sehingga menghambat mereka untuk bekerja. Tulisan ini ingin mendiskusikan langkah-langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk menanggulangi masalah kemiskinan.

Poverty is a very complex development issues. Poverty is seen as spillovers from development and part of the problem in development. The existence of poverty is characterized by unemployment, underdevelopment, and inequality between regions.

Poverty is also indicated by the presence of slums and squatter, and the existence of groups of people categorized as poor families caused by the limitations of economic, social and political life of their poor families. This phenomenon is demonstrated by the presence of several heads of families who are economically unable to meet the primary needs of family members. In addition, low levels of public education also makes it difficult to obtain jobs with adequate results or provide for his family. There are also a number of families whose low level of health that is hindering their work. This paper would like to discuss the steps that can be taken by the government to tackle poverty masalah.

KEY WORDS:

Poverty, Unemployment, Underdevelopmen, Inequality, Poor Family, Low Level of Education.

*) Pengajar FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu isu pembangunan yang kompleks dan kontradiktif (Irawan, 2002: 1). Kemiskinan dipandang sebagai dampak ikutan dari pembangunan dan bagian dari masalah dalam pembangunan. Keberadaan kemiskinan ditandai dengan adanya pengangguran, keterbelakangan, dan ketimpangan antar wilayah.

Tipologi kemiskinan dicirikan oleh berbagai dimensi, baik dimensi sosial maupun ekonomi yang lebih beragam serta memiliki kebijakan yang rumit. Hal tersebut membentuk pola kemiskinan yang berbeda-beda. Menurut Max-Neef et. al, terdapat 6 macam kemiskinan yang ditanggung komunitas dan membentuk suatu pola kemiskinan tertentu, yaitu (a) kemiskinan sub-sistensi, penghasilan rendah, jam kerja panjang, perumahan buruk, fasilitas air bersih mahal; (b) kemiskinan perlindungan, lingkungan buruk (sanitasi, sarana pembuangan sampah, polusi), kondisi kerja buruk, tidak ada jaminan atas hak pemilikan tanah; (c) kemiskinan pemahaman, kualitas pendidikan formal buruk, terbatasnya akses atas informasi yang menyebabkan terbatasnya kesadaran atas hak, kemampuan, dan potensi untuk mengupayakan perubahan, (d) kemiskinan partisipasi, tidak ada akses dan kontrol atas proses pengambilan keputusan yang menyangkut nasib diri dan komunitas; (e) kemiskinan identitas, terbatasnya pembauran antar kelompok sosial, terfragmentasi; dan (f) kemiskinan kebebasan, stres, rasa tidak berdaya, tidak aman baik di tingkat pribadi maupun komunitas.

Kemiskinan ditunjukkan dengan adanya permukiman-permukiman kumuh dan liar, serta adanya golongan masyarakat yang masuk kategori kelu-

arga miskin yang disebabkan oleh keterbatasan ekonomi, sosial dan politik dari masing-masing keluarga miskin tersebut. Fenomena ini ditunjukkan dengan adanya beberapa kepala keluarga yang secara ekonomi tidak dapat memenuhi kebutuhan primer anggota keluarganya. Selain itu, tingkat pendidikan masyarakat juga rendah sehingga mereka sulit memperoleh pekerjaan dengan hasil yang memadai atau mencukupi kebutuhan keluarganya. Terdapat pula sejumlah keluarga yang tingkat kesehatannya rendah sehingga menghambat mereka untuk bekerja.

Kemiskinan juga bisa terbentuk dari ketimpangan antar kawasan. Kawasan dengan aktivitas perkotaan (aktivitas perdagangan dan jasa) yang minimum menyebabkan perekonomian masyarakatnya rendah. Hal ini menyebabkan mayoritas penduduk di kawasan tersebut lebih rendah pendapatannya daripada penduduk kawasan kota.

Untuk menyikapi kondisi kemiskinan maka perlu dilakukan suatu tindakan peningkatan taraf hidup masyarakat setempat dengan cara meminimalisir faktor penyebab terjadinya kemiskinan masyarakat setempat.

Minimnya pendapatan penduduk yang diperoleh dari mata pencahariannya menyebabkan mayoritas penduduk masuk ke dalam kategori keluarga miskin. Jika kondisi tersebut dibiarkan tanpa penanganan lebih lanjut, dikhawatirkan dapat menyebabkan terjadinya hal-hal sebagai berikut:

- a. Terbatasnya penyediaan serta akses menuju sarana dan prasarana publik;
- b. Tingkat pendidikan penduduk rendah;
- c. Lingkungan yang semakin buruk dapat mengakibatkan lokasi permu-

- kiman menjadi tidak layak untuk dihuni;
- d. Tingkat kesehatan masyarakat rendah.

Tulisan ini ingin mendiskusikan langkah-langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk menanggulangi masalah kemiskinan.

MEMAHAMI KEMISKINAN

Definisi Kemiskinan

Kemiskinan adalah teori, fakta dan kebijakan bahkan masalah yang sudah sejak lama ada dan hampir dapat dikatakan akan tetap menjadi “kenyataan abadi”. Kemiskinan selalu mendapatkan tempat yang cukup penting dalam pembahasan pembangunan. Pengertian kemiskinan menurut Gunawan Sumodiningrat dkk (1999: 1) adalah sebuah konsep ilmiah yang lahir sebagai dampak ikutan dari pembangunan dalam kehidupan. Kemiskinan dipandang sebagai bagian dari masalah dalam pembangunan, yang keberadaannya ditandai dengan adanya pengangguran, keterbelakangan, yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan.

Sedangkan Sar A. Levitan mendefinisikan bahwa kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standard hidup yang layak. Oleh karena standard hidup itu berbeda-beda, maka tidak ada definisi kemiskinan yang dapat diterima secara universal (Levitan, 1980: 2). Hal ini sesuai dengan definisi kemiskinan yang diungkapkan oleh Bradley R. Schiller bahwa kemiskinan adalah ketidaksanggupan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial yang terbatas (Murin dkk, 1979: 214).

Kemiskinan dapat dilukiskan dengan kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok (Salim, 1984: 41). Dalam kaitannya dengan hal ini, World Bank mendefinisikan keadaan miskin sebagai: “*Poverty is concern with absolute standard of living of part of society the poor in equality refers to relative living standards across the whole society*” (World Bank, 1990; 26).

Dengan kata lain, kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan atau rumah tangga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimum. Kebutuhan tersebut hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang dapat hidup secara layak. Jika tingkat pendapatan tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum, maka orang atau rumah tangga tersebut dapat dikatakan sebagai keluarga miskin.

Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi, sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang memiliki potensi lebih tinggi. Masalah kemiskinan muncul karena adanya sekelompok anggota masyarakat yang secara struktural tidak mempunyai peluang dan kemampuan yang memadai untuk mencapai tingkat kehidupan yang layak. Akibatnya mereka harus mengakui keunggulan kelompok masyarakat lainnya dalam persaingan mencari nafkah dan kepemilikan aset produktif, sehingga semakin lama menjadi semakin tertinggal. Dalam prosesnya, gejala tersebut memunculkan persoalan ketimpangan distribusi pendapatan.

Kemiskinan dan Kemanusiaan

Suatu kondisi kemiskinan dapat

mendorong tindakan-tindakan yang dapat dipandang sebagai perbuatan yang menentang nilai-nilai kemanusiaan. Sudah tentu mereka yang hidup dalam kondisi kemiskinan (*the have nots*) akan membangun atau membentuk nilai-nilai tersendiri yang khas dan tidak sama dengan golongan lain di atasnya.

Sebagai contoh, kebiasaan kaum miskin hidup dalam kekurangan membuat cara hidup mereka tidak bisa memiliki kadar kebersihan sebagaimana golongan atas. Hal ini disebabkan oleh:

- a. Dari segi waktu, mereka kebanyakan tidak cukup punya waktu untuk memikirkan hal-hal lain di luar usaha mencari sesuap nasi.
- b. Dari segi ketersediaan fasilitas, memang tidak memungkinkan suasana yang bersih. Bagaimana orang yang tinggal di kolong jembatan atau di pinggir kali dapat memiliki tradisi bersih (menjaga kebersihan) apabila kondisi lingkungannya lebih buruk dibandingkan dengan mereka yang tinggal di rumah yang mapan. Selain itu, cara komunikasi mereka yang biasa tinggal dalam hiruk pikuk jalan, kebisingan yang tinggi, tentu saja akan terbiasa bersuara keras (volume suara). Dapatkah tradisi ini diterima? Apakah dapat diterima oleh norma-norma kesopanan dan etiket golongan elit?

Jika nilai-nilai dari golongan atas digunakan sebagai titik pijakan dan ukuran dalam menilai tingkat realisasi kemanusiaan, maka dengan sendirinya mereka yang bergelimang dalam kemiskinan dapat dikatakan hidup dalam kondisi kemanusiaan yang rendah. Sebagai contoh antara lain:

- a. Di tempat-tempat pembuangan

sampah, serombongan manusia saling berebut barang (sampah) yang baru diturunkan dari truk pengangkut.

- b. Pagi hari ketika kereta api masuk stasiun, anak-anak gelandangan saling berebut makanan bekas, sisa-sisa makanan dari para penumpang.
- c. Pemulung yang masih bersedia memakan makanan bekas yang sudah ada di tempat sampah.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kemiskinan menjadi kenyataan yang tidak memungkinkan nilai kemanusiaan dan martabat manusia tumbuh secara wajar. Masih adanya kemiskinan dengan sendirinya memberikan bukti bahwa keadaan kemanusiaan masih sangat memprihatinkan. Dalam kondisi yang demikian, pembicaraan mengenai martabat (kemuliaan) manusia hanya sebatas bagi mereka yang dalam posisi mapan, tetapi belum menyentuh pada mereka yang dihinakan karena hidup dalam kemiskinan dan menderita.

Akses Penduduk Miskin terhadap Pelayanan

Hambatan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dapat disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial, administrasi dan faktor kebijaksanaan (Cheema, 1986: 8). Faktor-faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Faktor ekonomi disebabkan penduduk miskin tidak memiliki kemampuan untuk membayar pelayanan karena rendahnya pendapatan mereka.
- b. Faktor sosial dimana penduduk perkampungan kumuh dan rumah-rumah liar tidak mempunyai hak milik yang sah terhadap lahan yang mereka tempati. Oleh karena itu, mereka merasa tidak harus mem-

bayar biaya penyediaan dan pemakaian fasilitas pelayanan. Sementara itu pemerintah enggan menyediakan pelayanan seperti saluran air bersih, listrik dan saluran air kotor untuk mereka.

- c. Sistem administrasi pemerintah daerah dan lembaga-lembaga lainnya, yang menentukan prioritas kebutuhan pelayanan, merencanakan program dan melaksanakan pembangunan. Akses penduduk miskin terhadap mereka sangat terbatas karena tidak memiliki lembaga formal untuk menyampaikannya keinginan mereka.
- d. Standar pemerintah untuk pelayanan biasanya terlalu tinggi, sehingga membutuhkan biaya yang tinggi untuk mendapatkan pelayanan. Pada akhirnya pelayanan tersebut lebih banyak dimanfaatkan oleh penduduk dengan pendapatan menengah.
- e. Penduduk miskin biasanya tidak terorganisasi. Sifat dan heterogenitas latar belakang sosial serta kemiskinan menghalangi terbentuknya organisasi kelompok masyarakat. Dengan demikian, mereka tidak mungkin menuntut hak jaminan pemenuhan pelayanan dasar.

Adanya keterbatasan dalam menerapkan suatu kebijaksanaan telah memperlihatkan ketidakmampuan administrasi dan politik dari pemerintah dan perencana untuk mengalokasikan sumber daya untuk menyediakan pelayanan dasar untuk penduduk miskin.

Bentuk Kemiskinan

Kemiskinan yang terjadi dapat menciptakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Terciptanya Permukiman kumuh dan liar

Tempat tinggal biasanya diwujudkan dalam bentuk fisik berupa rumah yang berfungsi sebagai wadah untuk lembaga terkecil masyarakat manusia, yang sekaligus dapat dipandang sebagai "shelter" bagi tumbuhnya rasa aman atau terlindungi. Suatu kawasan perumahan lengkap dengan prasarana lingkungan, prasarana umum, dan fasilitas sosial yang mengandung keterpaduan kepentingan dan keselarasan pemanfaatan sebagai lingkungan kehidupan (Soedarsono, 1992: 1). Dengan demikian, maka pengertian permukiman dapat dirumuskan sebagai suatu kawasan perumahan yang ditata secara fungsional sebagai satuan sosial, ekonomi dan fisik tata ruang, dilengkapi dengan prasarana lingkungan, sarana umum, dan fasilitas sosial. Kawasan tersebut merupakan suatu lingkungan yang ada untuk mendukung kelangsungan dan peningkatan mutu kehidupan manusia. Disamping itu, juga memberi rasa aman, tenteram, nikmat, nyaman dan sejahtera, dalam keselarasan, keserasian dan keseimbangan agar berfungsi sebagai wadah yang dapat melayani kehidupan pribadi, keluarga maupun masyarakat.

Namun, kemiskinan menyebabkan permukiman masyarakat setempat tidak dapat sesuai dengan definisi di atas. Terciptanya permukiman kumuh dan liar menggambarkan kemiskinan akan selalu nampak. Dari beberapa pendapat para pakar dan institusi terkait dapat disimpulkan bahwa permukiman kumuh dan liar dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain:

- 1) *Aspek fisik*

Berbagai sarana seperti jalan, saluran air limbah dan sebagainya dibangun serba terbatas. Juga pembangunan perumahannya dilakukan tanpa pedoman dan rencana.

- 2) Aspek sosial ekonomi
Permukiman tersebut merupakan tempat tinggal sebagian besar golongan berpenghasilan rendah (Cohen, 1975: 54). Ia adalah tempat penduduk yang status sosial dan ekonominya rendah dan kondisi perumahan di bawah standar (Krausse, 1976: 1).
- 3) Aspek tata ruang
Kampung tumbuh dan berkembang secara organik (*organic pattern*) yang pada akhirnya menjelma menjadi permukiman kumuh (Pontoh, 1994: 17).
- 4) Aspek hukum (*legalitas*)

Permukiman kumuh tidak selalu liar, demikian dengan liar tidak selamanya kumuh. Hunian liar dikaitkan dengan status kepemilikan tanah yaitu hunian yang dibangun di atas tanah bukan haknya (orang lain atau negara). Permukiman liar sebagian besar berada di atas tanah negara. Jadi bila ada permukiman kumuh yang menempati tanah negara atau bukan haknya merupakan permukiman umuh sekaligus liar. Dengan demikian berarti ada kumuh tidak liar yaitu permukiman yang didirikan di atas tanah milik atau tanah negara yang sudah diberikan haknya (hak guna bangunan dan hak guna usaha) dengan tata letak bangunan yang tidak beraturan.

Dan ada permukiman liar tidak kumuh yaitu bangunan yang didirikan di atas tanah bukan haknya yang menyadari akan kebersihan dan keindahan lingkungannya.

- b. Munculnya Sektor Informal (*self employed*)

Kemiskinan menyebabkan munculnya sektor informal. Sektor informal terbentuk karena revolusi industri telah mengubah cara berproduksi (*models of production*) manusia dari bekerja yang semula dilakukan dengan tangan kepada bekerja yang dilakukan dengan menggunakan mesin, dari semula orang bekerja di rumah berubah menjadi bekerja di pabrik atau kantor. Manusia yang semula bekerja atas dasar sektor informal dengan datangnya mesin terpaksa harus berhenti menggunakan cara-cara berproduksi dasar. Sektor informal dan buruh dari sekelompok orang yang memiliki pabrik-pabrik. Muncullah organisasi produksi baru yang didasarkan pada hubungan kerja antara majikan dan buruh. Masyarakat miskin berpendidikan rendah sulit untuk mengikuti prosedur perusahaan industri. Hal ini berakibat pada kehilangan mata pencaharian. Untuk itu, masyarakat miskin cenderung mencari nafkah dengan berjualan keliling dan lain sebagainya.

Permukiman kumuh dan sektor informal tercipta akibat pola mobilitas penduduk. Kondisi lingkungan yang di bawah standard tanpa sarana dan prasarana yang memadai, bukan merupakan permasalahan yang besar. Kedekatan dengan lapangan kerja, khususnya dalam sektor informal

seperti buruh industri dan bangunan, buruh pasar, bengkel, pengolahan sampah atau bahan bekas dan lain-lain merupakan faktor penentu yang jauh lebih penting. Bagi kalangan masyarakat mampu dengan penghasilan yang cukup dan tidak menghadapi masalah berkaitan dengan biaya transportasi dari rumah ke tempat kerja, belanja dan rekreasi, ikatan terhadap lokasi perumahannya tidak terlalu kuat. Kontak sosial mereka tidak lagi pada tangga dekat keluar dari batas-batas lingkungan perumahannya. Apalagi dengan adanya jaringan komunikasi telepon.

Dari sudut pandang ekonomi, masyarakat miskin tidak memiliki posisi yang kuat untuk melawan kekuatan dari luar. Akan tetapi dari sudut pandang sosial, mereka memiliki daya tahan (resistensi) yang tinggi dalam mempertahankan eksistensinya. *"For those with a weak economic important: they are more bound to their neighborhood"* (Nientied, 1982: 24).

Salah satu penyebab lain terjadinya resistensi yang tinggi dari para penghuni permukiman kumuh untuk tetap berada di lokasi semula adalah jarak yang dekat antara permukiman kumuh dengan pusat-pusat lapangan kerja yang digelutinya. Kebanyakan permukiman kumuh berada di tempat-tempat yang strategis di pusat kota (sekitar pasar, dekat rumah sakit, di belakang pegudangan, dan lain-lain), di tengah kota (menempati lahan kuburan, di tepi sungai, di belakang pertokoan), atau di pinggir kota dekat tempat pembuangan sampah, di atas tanggul).

Meskipun strategis, lokasi-lokasi yang diserbu oleh para migran untuk dijadikan lingkungan permukiman tersebut bukan lokasi yang ditetapkan sebagai daerah permukiman. Oleh

karena itu, permukiman kumuh selain mengandung pengertian kotor, jorok, padat dan tidak teratur, juga menyiratkan kesan liar atau tidak bersih dan memang arti dari *"squatters"* adalah mereka yang menempati jalan yang bukan miliknya tanpa hak atau ijin.

Sebab Terjadinya Kemiskinan

Menurut Loekman Sutrisno (1999: 5), kemiskinan merupakan sebuah pertanyaan yang tidak menarik dan sekaligus berbahaya. Pertanyaan tentang sebab tersebut pada akhirnya akan mengarah pada proses kemiskinan—bagaimana orang menjadi miskin. Tentu saja banyak pandangan yang berusaha untuk menjelaskan adanya kemiskinan tersebut.

Di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, orang miskin pada umumnya merupakan kelompok masyarakat yang berada di luar sektor ekonomi yang "terorganisasi", yaitu petani-petani yang bekerja sendiri di pedesaan dan orang-orang di sektor informal (*self employed*) perkotaan yang tumbuh pesat dan tidak mendapatkan pekerjaan yang memadai. Pertumbuhan absolut jumlah orang miskin menyebabkan perhatian dan upaya penanganan kemiskinan menjadi suatu "agenda" penting dalam lingkup pembangunan.

Kenyataan menunjukkan bahwa kemiskinan tidak bisa didefinisikan dengan sangat sederhana, karena tidak hanya berhubungan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan material, tetapi juga sangat berkaitan dengan dimensi kehidupan manusia yang lain. Menurut Bank Dunia (2003), beberapa penyebab dasar dari kemiskinan adalah sebagai berikut:

a. kegagalan kepemilikan terutama

- tanah dan modal;
- b. terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana;
- c. kebijakan pembangunan yang bias;
- d. adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung;
- e. adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern);
- f. rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat;
- g. budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungannya;
- h. tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (*good governance*);
- i. pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan.

Indikator Kemiskinan

Berdasarkan sebab terjadinya kemiskinan, maka indikator utama kemiskinan dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Menurut BAPPENAS

BAPPENAS merumuskan indikator-indikator kemiskinan dengan rumusan yang konkrit berikut ini: terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, dilihat dari stok pangan yang terbatas, rendahnya asupan kalori penduduk miskin dan buruknya status gizi bayi, anak balita dan ibu. Sekitar 20 persen penduduk dengan tingkat pendapatan terendah hanya mengkonsumsi 1.571 kkal per hari. Kekurangan asupan kalori, yaitu kurang dari 2.100 kkal per

hari, masih dialami oleh 60 persen penduduk berpenghasilan terendah (BPS, 2004); terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan disebabkan oleh kesulitan mendapatkan layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar, kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup sehat, dan kurangnya layanan kesehatan reproduksi; jarak fasilitas layanan kesehatan yang jauh, biaya perawatan dan pengobatan yang mahal. Di sisi lain, utilisasi rumah sakit masih didominasi oleh golongan mampu, sedang masyarakat miskin cenderung memanfaatkan pelayanan di PUSKESMAS. Demikian juga persalinan oleh tenaga kesehatan pada penduduk miskin, hanya sebesar 39,1 persen dibanding 82,3 persen pada penduduk kaya. Asuransi kesehatan sebagai suatu bentuk sistem jaminan sosial hanya menjangkau 18,74 persen penduduk, dan hanya sebagian kecil di antaranya penduduk miskin; terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan yang disebabkan oleh kesenjangan biaya pendidikan, fasilitas pendidikan yang terbatas, biaya pendidikan yang mahal, kesempatan memperoleh pendidikan yang terbatas, tingginya beban biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung; terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan seperti buruh migran perempuan dan pembantu rumahtangga; terbatasnya akses layanan perumahan dan

sanitasi. Masyarakat miskin yang tinggal di kawasan nelayan, pinggiran hutan, dan pertanian lahan kering kesulitan memperoleh perumahan dan lingkungan permukiman yang sehat dan layak. Dalam satu rumah seringkali dijumpai lebih dari satu keluarga dengan fasilitas sanitasi yang kurang memadai; terbatasnya akses terhadap air bersih. Kesulitan untuk mendapatkan air bersih terutama disebabkan oleh terbatasnya penguasaan sumber air dan menurunnya mutu sumber air; lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah. Masyarakat miskin menghadapi masalah ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah, serta ketidakpastian dalam penguasaan dan pemilikan lahan pertanian.

b. Menurut Bank Dunia

Indikator utama kemiskinan menurut Bank Dunia adalah kepemilikan tanah dan modal yang terbatas; terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan; pembangunan yang bias; perbedaan kesempatan di antara anggota; perbedaan sumber daya manusia; rendahnya produktivitas; budaya hidup yang jelek; tata pemerintahan yang buruk; dan pengelolaan sumber daya alam yang buruk.

B. ALTERNATIF SOLUSI

Pada bagian ini penulis akan memaparkan alternatif solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan sebagai berikut:

Optimalisasi Lembaga Zakat dan Wakaf

Lembaga zakat dan wakaf telah diakui keberadaannya di Indonesia sejak

lama dan pengaturannya telah mencapai level undang-undang. Selain itu, potensi zakat dan wakaf sangat besar sehingga sangat memungkinkan untuk digunakan guna mengatasi masalah kemiskinan di negeri ini. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional dan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB pada tahun 2011, potensi zakat secara nasional mencapai angka Rp 217 triliun atau setara dengan 3,40 persen dari total PDB. Sedangkan potensi wakaf di Indonesia, yaitu potensi dari wakaf tanah seluas 2.171.041.349. m² yang tersebar di 414.848 (Data Departemen Agama Tahun 2010) dan potensi wakaf uang yang mencapai Rp 20 triliun per tahunnya (asumsi yang dibuat oleh Mustafa Edwin Nasution).

Agar potensi zakat dan wakaf tersebut bisa dioptimalkan untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia, diperlukan sinergisitas unsur pemerintah dengan elemen masyarakat, dalam hal ini antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan lembaga amil zakat serta antara Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan nazhir wakaf. Dalam membuat program-program untuk mengatasi masalah kemiskinan, baik BAZNAS dan BWI maupun amil dan nazhir, sebaiknya berusaha agar program-program tersebut sinergis dan bisa saling melengkapi sehingga tidak ada program yang tumpang tindih satu sama lain. Oleh karena itu, BAZNAS dan BWI sebagai elemen pemerintah perlu terus mengayomi amil dan nazhir yang ada di Indonesia agar bisa bergerak bersama untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia.

Perang Melawan Kemiskinan

Ali bin Abi Thalib, salah seorang *khulafaur rasyidin*, pernah berkata,

“Seandainya kemiskinan berwujud seorang manusia niscaya aku akan membunuhnya.” Ucapan Ali bin Abi Thalib tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan suatu masalah yang harus diperangi, khususnya oleh masyarakat Indonesia. Jika selama ini kita mengenal adanya perang melawan korupsi, perang melawan terorisme, perang melawan narkoba, maka perlu dicanangkan juga perang melawan kemiskinan. Tentunya perang melawan kemiskinan yang dimaksud bukan hanya sekadar slogan dan wacana saja, tetapi juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Pejabat pemerintah, baik yang berada di lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, harus menjadi garda terdepan dalam melawan kemiskinan ini dengan cara memberikan contoh untuk peduli terhadap masalah kemiskinan. Sebagai contoh, presiden sebagai kepala pemerintahan menginstruksikan seluruh pejabat yang ada di bawahnya untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada fakir miskin (misalnya melalui zakat dan wakaf). Apabila instruksi tersebut tidak dilaksanakan, maka pejabat tersebut akan dikenakan sanksi.

Selain itu, perang melawan kemiskinan juga bisa diwujudkan dalam sosialisasi pelaksanaan zakat dan wakaf secara massif kepada seluruh masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan memiliki kelebihan harta. Diperlukan kerja keras, terutama oleh BAZNAS, BWI serta lembaga-lembaga zakat dan wakaf lainnya, untuk mensosialisasikan pelaksanaan zakat dan wakaf untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Dalam melakukan sosialisasi tersebut, perlu juga diberikan pemahaman bahwa kemiskinan merupakan masalah yang harus segera diatasi oleh

semua elemen di negeri ini. Adanya sosialisasi tersebut diharapkan dapat membangun kepedulian masyarakat Indonesia untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia melalui zakat dan wakaf.

Pemberdayaan (Empowerment)

Konsep “*empowerment*” (pemberdayaan), yang dibidani oleh *Friedmann* (1992), muncul karena adanya dua premis mayor, yakni kegagalan dan harapan. Kegagalan yang dimaksud, adalah gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. Sedangkan harapan, muncul karena adanya alternatif-alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, persamaan antar generasi, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Kegagalan dan harapan, menurut *Friedmann* (1992) bukanlah merupakan alat ukur dari hasil kerja ilmu-ilmu sosial, melainkan lebih merupakan cermin dari nilai-nilai normatif dan moral. Kegagalan dan harapan, akan terasa sangat nyata pada tingkat individu dan masyarakat. Pada tingkat yang lebih luas, yang dirasakan adalah hanya gejala dari kegagalan dan harapan. Dengan demikian “pemberdayaan masyarakat”, pada hakekatnya adalah nilai kolektif dari pemberdayaan individual.

Konsep “*empowerment*”, sebagai suatu konsep alternatif pembangunan, pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat, yang berlandaskan pada sumber daya pribadi, langsung (melalui partisipasi), demokratis, dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung (*Friedmann*,

1992). Sebagai titik fokusnya adalah lokalitas, sebab “civil society” akan merasa siap diberdayakan lewat isu-isu lokal. Namun juga sangat tidak realistis apabila kekuatan-kekuatan ekonomi dan struktur-struktur di luar “civil society” diabaikan. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat tidak hanya sebatas ekonomi saja namun juga secara politis, sehingga pada akhirnya masyarakat akan memiliki posisi tawar baik secara nasional maupun internasional.

Konsep “empowerment”, merupakan hasil kerja dari proses interaktif baik di tingkat ideologis maupun praksis. Di tingkat ideologis, konsep “empowerment” merupakan hasil interaksi antara konsep “top-down” dan “bottom-up”, antara “growth strategy” dan “people centered strategy”. Sedangkan di tingkat praktis, interaktif akan terjadi lewat pertarungan antar otonomi. Beberapa pertanyaan kunci berikut dari Friedmann (1982:167-171) barangkali akan memperjelas konsep “empowerment” yang dikenalkannya, sebagai berikut:

- a. *What principles should guide the state in its dealings with the excluded minorities?*
- b. *Should an empowerment approach focus on individuals and their competitive ability to move ahead, or on households and their access to the bases of social power?*
- c. *What incentives can be devised to encourage communities to organize and undertake initiatives of their own?*
- d. *What are the respective roles of communities, states, and private voluntary organizations in a territorially organized process of self-development?*
- e. *How can a sense of territory-based identities be strengthened?*
- f. *How can the coproduction of life and livelihood be organized among disempowered households?*
- g. *What planning models are appropriate to*

household and community selfempowerment?

- h. *What constraints in structure and policy must give way to make selfdevelopment along an alternative path possible?*

Untuk implementasi pemberdayaan di masyarakat dapat dilakukan dengan 3 tahap yaitu tahapan pemberdayaan individu, pemberdayaan ikatan antar individu/kelompok, dan pemberdayaan politik.

Membangun Pemberdayaan Individu

Beberapa langkah yang diperlukan untuk membangun pemberdayaan individu adalah sebagai berikut:

Pertama; pemberdayaan waktu, yang diartikan sebagai usaha mengurangi pemborosan waktu yang dihabiskan oleh individu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (air bersih, kesehatan dan transport). Penyediaan fasilitas air bersih dan transportasi yang baik, akan sangat membantu individu-individu untuk memanfaatkan waktunya bagi kegiatan-kegiatan ekonomi produktif. Juga informasi dan pelayanan kesehatan harus tertuju langsung pada jarak yang relatif dekat dengan individu.

Kedua; pemberdayaan psikologis, yang berarti pembangunan keyakinan diri bahwa para individu yang nantinya dipilih untuk menerima program ini adalah individu-individu yang mampu menularkan atau menarik individu-individu lain yang belum beruntung untuk bergabung ke dalam kegiatan usahanya.

Ketiga; pemberdayaan usaha ekonomi, melalui suatu proses yang mengarah pada terbentuknya jaringan usaha antar anggota keluarga, antar tetangga, antar kelompok masyarakat, kemudian terkait dengan ekonomi pasar (baik formal maupun informal). Pember-

dayaan ini juga mengarah pada terbangunnya keberlanjutan usaha ekonomi antar generasi (*inter-generational continuity*).

Membangun Pemberdayaan Ikatan Antar Individu/Kelompok (*Spiral Mode*)

Pada hakekatnya individu dengan individu yang lainnya diikat oleh suatu ikatan yang disebut keluarga. Demikian pula antar keluarga satu dengan keluarga yang lain diikat oleh suatu ikatan kebertetangaan. Begitu seterusnya sampai pada tingkatan yang lebih tinggi. Pada tingkatan yang pertama, hubungan yang terjadi dapat disebabkan oleh adanya saling percaya satu terhadap lainnya, keyakinan keagamaan, kesamaan keturunan, kesamaan nasib, dan atau kedekatan bertetangga. Pada tingkatan lebih tinggi, hubungan ini dapat terwujud di dalam suatu gerakan buruh, organisasi politik, dan sebagainya.

Tantangan utama di dalam pemberdayaan ikatan ini adalah bagaimana memberdayakan sumber daya : (1) *waktu*, (2) *keterampilan* dan (3) *modal* yang dimiliki oleh keluarga-keluarga (misal para nelayan di daerah pesisir) ke dalam domain-domain ekonomi, (4) *politik*, dan (5) *sosio-kultural*. Penguatan hubungan ikatan ini akan dilakukan secara bertahap mengikuti suatu lintasan spiral mulai dari penguatan individu, antar kelompok, terus naik ke atas menuju pada domain sosial politik yang lebih luas lagi, sampai pada domain ekonomi mikro dan makro. Dalam kaitan ini, konsep keterkaitan (*linkage*) menjadi sangat penting, sehingga diperlukan adanya aktor (*organizer*) yang dapat dan mampu memainkan atau menggerakkan spiral ini dari bawah (tingkat individu)

sampai pada tingkat ekonomi mikro dan makro.

Sangat disadari, bahwa di dalam perjalanannya nanti, lintasan spiral ini akan banyak menghadapi paradoks dan dialektika antara : (1) syarat-syarat ekonomi rasional melawan nilai-nilai sosio-kultural (moral), (2) ekonomi formal melawan ekonomi informal, (3) akumulasi kapital melawan ekonomi subsistensi, (4) ruang kehidupan biologi-sosial melawan ruang kegiatan ekonomi. Adapun beberapa langkah yang dapat diusulkan untuk membangun keberdayaan institusi adalah sebagai berikut:

- a. Memperkuat ikatan antar individu, antar keluarga yang bertetangga dekat, dan antar kelompok keluarga, melalui penciptaan ketergantungan yang rasional antara kegiatan usaha ekonomi dan nilai-nilai sosio-kultural yang hidup di dalam masyarakat.
- b. Penguatan ikatan melalui penciptaan ketergantungan yang rasional antara kegiatan usaha ekonomi dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat dimaksudkan agar kegiatan usaha ekonomi yang dikembangkan dapat berlanjut antar keturunan atau antar generasi (*inter-generational continuity*).
- c. Dengan perkataan lain, pengembangan (perguliran) aset dan kegiatan usaha ekonomi harus memanfaatkan dan mempertimbangkan ikatan-ikatan sosio-kultural yang telah ada. Pada tahap-tahap awal program, perguliran diberikan kepada individu atau kelompok yang memiliki dasar-dasar keterkaitan sosio-kultural dalam komunitas masyarakat.
- d. Pada pengembangan selanjutnya,

keterkaitan antara kegiatan usaha ekonomi individu, keluarga dan atau kelompok ini dengan domain ekonomi pada tingkatan mikro dan makro perlu dikembangkan, dalam rangka membawa lintasan spiral tersebut ke atas. Dalam tingkatan ini, selain diperlukan adanya aktor (*organizer*) yang mampu membawa lintasan spiral ini ke atas, juga diperlukan adanya pemberdayaan politik yang menyertainya.

Membangun Pemberdayaan Politik

Pada hakekatnya pemberdayaan politik di sini dimaksudkan sebagai lawan dari pengabaian politik (*political exclusion*). Pada praktek ekonomi yang terjadi saat ini telah ditemukan adanya pengabaian politik ekonomi (*economic and political exclusion*) oleh "*urban-metropolitan economy*" dan "*multinational economy*" terhadap si-miskin di wilayah kantong kemiskinan dan yang paling menonjol di daerah pesisir. Pengabaian ekonomi dan politik nampak pada tidak dimasukkannya para miskin di pesisir ke dalam proses dan struktur akumulasi kapital dari "*multinational*" maupun "*national corporation*". Dengan demikian, konsep pemberdayaan politik yang ditawarkan di sini merupakan konsep perlawanan terhadap fenomena-fenomena yang dilukiskan di atas. Beberapa konsep dasar yang dapat diusulkan untuk membangun keberdayaan politik dari para miskin pesisir ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pemberdayaan politik yang dituju di sini adalah terbentuknya mobilisasi dan "kesalingterkaitan" antara kekuatan negara (*state power*), kekuatan ekonomi (*economic power*), dan kekuatan sosial (*social power*).
- b. Dalam peta "kesalingterkaitan"

antara kekuatan-kekuatan tersebut dapat ditunjukkan letak inti (*core*) dari masing-masing kekuatan tersebut. Pada negara (*state*), inti kekuatan terletak pada lembaga-lembaga formal pemerintahan dan perangkat-perangkat hukum yang dimiliki. Pada kekuatan sosial (*civil society*), inti kekuatan terletak pada institusi keluarga melebar ke institusi sosial (keagamaan, kesenian, dan sebagainya). Pada kekuatan ekonomi, inti kekuatan terletak pada institusi-institusi yang berujud dalam korporasi ekonomi.

- c. Pada tingkat praktis, pemberdayaan politik di sini akan mengarah pada terbangunnya "kesalingterkaitan" (*linkage*) antara keluarga-keluarga miskin di wilayah miskin dengan lembaga-lembaga pemerintah dan korporasi ekonomi baik nasional maupun internasional.

Secara praksis, langkah-langkah yang ditawarkan bagi pemberdayaan politik dalam program ini adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong agar kelompok-kelompok individu berkembang menjadi "*civil society*" yang memiliki kekuatan tawar-menawar.
- b. Mendudukan lembaga-lembaga pemerintah sebagai tulang punggung (*backbone*) bagi terbangunnya keterkaitan antara kekuatan-kekuatan sosial masyarakat miskin dengan korporasi-korporasi ekonomi nasional dan multinasional.
- c. Melalui kekuatan lembaga-lembaga pemerintah, korporasi ekonomi nasional dan multinasional diminta untuk membuka pasarnya bagi produk-produk yang dihasilkan oleh komunitas miskin, atau memberikan sebagian dari kegiatan produk-

sinya kepada para keluarga miskin melalui mekanisme sub-kontrak.

Dalam perspektif spasial, pembangunan masyarakat miskin dalam kaitannya dengan pendekatan pemberdayaan (*empowerment*) lebih diartikan sebagai penguatan *territory based identities*. Pemberdayaan masyarakat miskin, salah satunya adalah penguatan identitas yang berbasis teritori ini. Dan identitas ini tidak begitu saja diserahkan atas nama pembangunan. Dengan demikian proses pengembangan masyarakat miskin, seyogyanya tidak didasari oleh rencana standar yang sama dan/atau seragam untuk seluruh wilayah, namun didasarkan pada kondisi dan potensi sumber daya alam dan kegiatan usaha yang ada dan akan berkembang.

Pendekatan Ekonomi Pemberdayaan Nelayan Kecil/Gurem

Secara umum pemberdayaan masyarakat miskin dapat dilakukan dengan cara meningkatkan aksesibilitas mereka pada sumber-sumber kekayaan sosial, ekonomi dan budaya. Secara sosial, beban kemiskinan yang mereka hadapi akan dapat diatasi dengan cara menyediakan mereka bantuan sosial. Secara ekonomi, beban mereka akan juga dapat diatasi melalui dukungan modal. Secara budaya, beban mereka akan dapat mereka atasi sendiri dengan cara membangkitkan etos kerja dan kemampuan bekerja melalui peningkatan keterampilan kerja mereka. Pendekatan sosial, ekonomi atau budaya semata untuk memberdayakan nelayan atau petani gurem hanya akan berdampak sekejap atau jangka pendek. Pemberdayaan nelayan atau petani ikan mengandung makna penyelesaian masalah kemiskinan multi dimensi sosial, ekonomi dan

budaya. Oleh karena itu pendekatan pemecahan masalah adalah bersifat multi dimensi dan komprehensif.

Penguatan Organisasi Ekonomi Dalam Komunitas Desa

“Desa” adalah unit dasar dari kehidupan pedesaan. Di ini “desa”

mengandung arti sebagai “desa alamiah” atau dukuh tempat orang hidup dalam ikatan keluarga dalam suatu kelompok perumahan dengan saling ketergantungan yang besar di bidang sosial dan ekonomi, tidak ada keharusan untuk sama dengan unit administratif setempat. Komunitas desa dalam ekonomi yang sedang berkembang untuk sebagian besar memenuhi kebutuhan sendiri dan berorientasi pada kebutuhan pokok, sungguhpun hubungan pasar dengan sektor perkotaan dapat juga berlangsung. Berlainan dengan ekonomi pasar di daerah perkotaan dengan pembagian fungsinya yang mencolok antara perusahaan dan rumah tangga di bidang produksi dan konsumsi, produksi seorang nelayan dan petani ikan gurem tidak dapat dipisahkan dengan konsumsi keluarganya. Komunitas desa mengatur kegiatan ekonomi nelayan atau petani ikan dengan mengadakan koordinasi dalam pemakaian sumber daya yang langka melalui adat kebiasaan dan kelembagaan. Seorang nelayan atau petani ikan gurem merupakan satu unit produksi yang terlalu kecil untuk dapat berbuat banyak demi menanggulangi kepentingan bersama.

Adalah suatu keharusan bagi komunitas desa untuk menyusun tindakan secara kolektif dan mendorong kerja sama dalam satu komunitas. Faktor utama lain yang mendorong kerja sama antara para nelayan dan petani ikan

adalah permintaan akan pekerja yang sifatnya sangat bergantung pada musim dan produksi perikanan. Pada masa-masa puncak musim, jumlah pekerja yang melebihi kapasitas kerja keluarga selalu diperlukan untuk memenuhi jadwal kerja. Disamping itu, merupakan hal yang lazim, bahwa penduduk desa pantai terbagi dalam berbagai sub-klas nelayan atau petani ikan. Hanya saja dalam komunitas pedesaan pantai, bahkan bagi mereka yang tidak memiliki alat produksi merasa berhak atas pemakaian alat produksi (kapal) bukan miliknya dengan cara khas penetapan seperti sistem bagi hasil.

Seperti lazimnya dalam perjanjian bagi hasil, di dalam komunitas desa ada kecenderungan yang amat kuat untuk mengaitkan berbagai transaksi ekonomi menjadi hubungan yang sangat pribadi sifatnya. Seorang pemilik perahu tidak hanya menerima bagian perahu atas hasil tangkapannya, dia ada kewajiban menanggung biaya-biaya produksi, bahkan memberikan kredit untuk para pekerja memenuhi keperluan konsumsi-

nya. Sering pula, para pemilik kapal, yang selanjutnya disebut *juragan*, bertindak sebagai pelindung (*patron*) terhadap si pendega.

Hubungan semacam ini biasanya disebutkan sebagai hubungan antara bapak dan anak buah (*patron-client relationship*), dalam hal ini hubungan juragan dan anak buah kapal (ABK), dalam hubungan ini, seseorang dengan status sosial-ekonomi yang lebih tinggi (*patron*) menggunakan pengaruh dan sumber-sumber yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan atau keuntungan bagi individu yang statusnya lebih rendah (*client*), dan sebaliknya para *client* tadi membalas dengan memberikan dukungan kepada bapak (*patron*) tadi. Kelembagaan yang menguasai ekonomi nelayan tersebut yang bercirikan cara-cara produksi seperti digambarkan di atas, lebih merupakan adat kebiasaan dan prinsip-prinsip moral dan pada perjanjian resmi. Prinsip moral yang tertanam adalah "saling menolong dan berbagi pendapatan di kalangan nelayan atau petani ikan".[]

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ramlan Subakti. 1984. "Kemiskinan di Kota dan Program Perbaikan Kampung : Kota Bermuka Dua". *PRISMA*. No. 5 tahun XIII.
- Andre Bayo Ala, 1996. *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*. Yogyakarta : Liberty.
- Badan Amil Zakat Nasional dan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB pada tahun 2011
- Bahar Suharto. 1993. *Pengertian, Fungsi, Format Bimbingan dan Cara Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung : Tarsito.
- Boedhi Tjahjati S Soegijoko B.S. Kusbiantoro. 1997. *Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia (mengenang Prof. Dr. Soegijanto Soegijoko)*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Budihartono. 1993. *Pola Permukiman di Jakarta dengan Tekanan pada Kehidupan Kampung*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

- C. Djemabut Blaang, 1986. *Perumahan dan Permukiman sebagai Kebutuhan Pokok*. Jakarta : Yayasan Obor.
- Clarence N Stone et al. 1979. *Urban Policy and Politics in A Beruacratic Age*. New Jersey : Prentice-Hall Inc.
- Clifford Jansen. 1969. *Some Sociological Aspect of Migration*. Cambridge : The University Press.
- Data-data Bidang Perumahan dan Permukiman*. Kantor Menteri Negara Perumahan Rakyat Jakarta. 1993.
- David Baker. 1980. "Memahami Kemiskinan di Kota : Masa Apung di Kota". *PRISMA*. No. 6 Tahun VIII.
- Didik J Rachbini, dkk. 1994. *Ekonomi Informal Perkotaan : Gejala Involusi Gelombang Kedua*. Jakarta : LP3ES.
- Eko Budihardjo dan Djoko Sujarto. 1998. *Kota yang Berkelanjutan (Sustainable City)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Eko Budihardjo dan Sudanti Hardjohudojo. 1993. *Kota Berwawasan Lingkungan*. Cetakan III. Bandung : Penerbit Alumni.
- Eko Budihardjo. 1984. *Sejumlah Masalah Permukiman Kota*. Cetakan I. Bandung : Penerbit Alumni.
- _____. 1986. *Arsitektur dan Kota di Indonesia*. Cetakan III. Bandung : Penerbit Alumni.
- _____. 1997. *Lingkungan Binaan dan Tata Ruang Kota*. Cetakan I. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- _____. 1997. *Tata Ruang Perkotaan*. Bandung : Penerbit Alumni.
- _____. 1998. *Percikan Masalah Arsitektur Perumahan Perkotaan*.
- Emil Salim. 1984. *Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan*. Jakarta : Inti Idayu Press.
- Gunanjar Sasmita. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta : Pustaka Cidesindo.
- Gunawan Permadi, dkk. 1999. *Selinting Ganja di Tangan*. Semarang : Yayasan Duta Awam bersama Terre des Homes Netherlands.
- Hadi Sabari Yunus. 2000. *Struktur Tata Ruang Kota*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hasan Purbo. 1993. *Katalis Fasilitator Pembangunan dan Konsultan Pembangunan, Dua Sejoli Untuk Menghadapi Tantangan Pembangunan Perumahan dan Permukiman di Waktu Mendatang*. Jakarta : Masyarakat Jurnal Sosiologi Jurusan Fisiologi FISIP UI dengan Gramedia Pustaka Utama.
- Hendra Esmara. 1986. *Perencanaan dan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Herlianto. 1997. *Urbanisasi Pembangunan dan Kerusakan Kota*. Bandung : Penerbit Alumni.
- Identifikasi dan Indikasi Lokasi Kawasan Kumuh di 6 (enam) Kota/Kabupaten di Jawa Tengah*. Proyek Strategi Penanganan Kawasan. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. 2000.
- Irwanto, dkk. 1995. *Pekerja Anak di Tiga Kota Besar : Jakarta, Surabaya dan Medan*. Jakarta : Pusat Penelitian Unika Atma Jaya – UNICEF.
- J Bremen. 1980. *The Informal Sector in*

- Research Theory and Practice*. New Jersey : Prentice-Hall Inc
- J Friedman and Sullivan, F. 1974. *The Absorbition of Labour in The Urban Economy : The Case of Developing Country*. New Jersey : Prentice-Hall Inc.
- Johan Silas. 1993. *Permukiman Kumuh di Jakarta : Tinjauan Kontradiktif-Komparatif*. Jakarta : Masyarakat Jurnal Sosiologi Jurusan Fisiologi FISIP UI dengan Gramedia Pustaka Utama.
- John L Taylor. Kampung-Kampung Miskin dan Tempat Pengelompokan Liar di Kota-Kota Asia Tenggara. *PRISMA*. No. 7 Desember 1972.
- Karakteristik Kemiskinan di Kotamadya Bandung : Kasus Studi Lingkungan Cikapundung, Lingkungan Sukapada, Kampung Pangaritan*. Tugas Mata Kuliah : Seminar Prinsip Perencanaan. Jurusan Teknik Planologi FTSP-ITB Bandung. 1992.
- Kepulauan Riau dalam Angka 1999*. Bappeda Kabupaten Kepulauan Riau dan BPS Kepulauan Riau. 1999.
- Loekman Soetrisno. 1997. *Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan*. Yogyakarta : Penerbit Kanisius.
- _____. 1999. *Jalan Kemanusiaan – Panduan Untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta : Lapera Pustaka Utam.a
- Muhammad Agung Ridlo. 1990. *Evaluasi Pemukiman Kembali (Resettlement) Masyarakat Miskin (Daerah Studi : permukiman YSS Mangunharjo dan Mayangsari di Kota Semarang)*. Skripsi tidak diterbitkan. Jurusan Teknik Planologi Universitas Islam Bandung.
- _____. 1995. *Masalah, Gagasan dan Strategi Perencanaan Pembangunan Kota – Desa*. Kumpulan Essay penulis di beberapa media surat kabar di Indonesia tidak diterbitkan. Semarang.
- _____. 2001. *Kemiskinan di Perkotaan*. Semarang: Unissula Press.
- _____. 2002. *Karakteristik Kemiskinan Perkotaan pada Permukiman Kumuh dan Liar Kota Semarang*. Tesis tidak diterbitkan. Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang.
- Nientied, P et. al. 1982. *Karachi Square Settlement Upgrading*. Amsterdam : Virje Universiteit.
- Patrick Mc Auslan. 1986. *Tanah Perkotaan dan Perlindungan Rakyat Jelata*. Jakarta : Gramedia.
- Penjelasan Umum : Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)*. Tim Persiapan P2KP Jakarta. 1999.
- Penyiapan Masyarakat, Survey, Pengukuran dan Penggambaran Program Penataan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kotamadya Semarang*. Laporan Identifikasi (Rencana Paket Pekerjaan dan Pendampingan Masyarakat). Proyek Peningkatan Prasarana Permukiman Jawa Tengah, Departemen Pekerjaan Umum, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. Semarang. 1998.
- Permukiman Kumuh dalam Kaitannya dengan Lapangan Kerja Sektor Informal*. Proyek Penelitian dan Pe-

- ngembangan Regional Jawa Tengah. Fakultas Teknik Undip Semarang. 1990.
- Piet Riedvelt, dkk. 1988. *Mobilitas Ulang-Alik Penduduk Pedesaan (Suatu Studi Kasus di Kabupaten Boyolali Jawa Tengah)*. Semarang : Satya Wacana.
- Profil Kemiskinan di Indonesia*. Biro Pusat Statistik (BPS) Pusat Jakarta. 2000.
- Program Penanganan Kawasan Kumuh Kotamadya Dati II Semarang : Laporan Pendampingan*. Proyek Peningkatan Prasarana Permukiman Jawa Tengah, Departemen Pekerjaan Umum, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. Semarang. 1998. Rineka Cipta.
- Robert Chambers, 1983. *Rural Development: Putting The Last First*. New York: Longman Inc.
- San. A Levitan. 1980. *Programs in Aid of The Poor far The 1980's : Policy Studies Employment and Welfare No. 1 Fourth Edition*. London : The Jhones Hopkins University Press
- Sarlito Wirawan Sarwono. 1987. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta : Rajawali.
- Sayogyo. 1996. *Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan*. Yogyakarta : Aditya Media.
- Siagian. 1989. *Perencanaan Pembangunan (Suatu Pengantar)*. Semarang : Satya Wacana.
- Siswono Yudohusodo, dkk. 1991. *Perumahan Untuk Seluruh Rakyat*. Jakarta : INKOPPOL.
- Siswono Yudohusodo. 1990. *Tumbuhnya Permukiman-Permukiman Liar di Daerah Perkotaan sebagai Akibat dari Urbanisasi yang Tinggi*. Sinopsis pada Seminar Hunian Liar di Perkotaan. Jakarta.
- Supardi Suparlan. 1995. *Kebudayaan Kemiskinan dalam Kemiskinan di Perkotaan : Bacaan Untuk Antropologi Perkotaan*. Yogyakarta : YOI.
- Thee Kian Wie. 1983. *Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan : Beberapa Pendekatan Alternatif*. Jakarta : LP3ES.
- Tjahya Supriyatna. 1997. *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*. Bandung : Humaniora Utama Press.
- _____. 2000. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Jakarta :
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 mengenai Penataan Ruang.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 mengenai Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 mengenai Perumahan dan Permukiman.
- Y. Argo Twikromo. 1999. *Pemulung Yogyakarta – Konstrksi Marginalitas dan Perjuangan Hidup dalam Bayang-Bayang Budaya Dominan*. Yogyakarta : Media Presindo.
- Yogyakarta : Gajahmada University Press.

INDEKS PENULIS

A

Akmal Salim Ruhana

"Terorisme [sama dengan] Jihad?"

Jurnal Dialog Vol.36, No.2, November 2012. hal: 149

Ali Usman

Kolumnis pendidikan, peneliti Lembaga Analisis Sosial dan Penguatan Masyarakat (LANSKAP) Yogyakarta

"Menguji Efektivitas Kurikulum Pendidikan Antikorupsi di Indonesia"

Jurnal Dialog Vol.36, No.2, November 2012. hal: 65

Arief Subhan

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

"Mencari Perspektif Terorisme di Indonesia: Kajian Awal"

Jurnal Dialog Vol.36, No.2, November 2012. hal: 81

H

Herdi Sahrasad

Dosen tetap Sekolah Pasca Sarjana Universitas Paramadina

"Agama dan Masalah Korupsi: Sebuah Catatan"

Jurnal Dialog Vol.36, No.2, November 2012. hal: 1

I

Iyoh Mastiyah

Peneliti Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

"Relasi Jender dalam Perspektif Pesantren"

Jurnal Dialog Vol.36, No.2, November 2012. hal: 19

N

Nurudin

Peneliti Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Balitbang dan Diklat Kemenag RI

"Pendidikan Karakter Berbasis Nilai Kemanusiaan: Ikhtiar Mengatasi Konflik Sosial-keagamaan di Indonesia"

Jurnal Dialog Vol.36, No.2, November 2012. hal: 31

S

Sudirman Tebba

Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

"Pergeseran Konflik Sosial Keagamaan di Indonesia"

Jurnal Dialog Vol.36, No.2, November 2012. hal: 113

Suprpto

Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan

“Paradigma Baru Kediklatan (Penyelenggaraan Diklat Jarak Jauh pada Balai Diklat Keagamaan Padang)”

Jurnal Dialog Vol.36, No.2, November 2012. hal: 127

Syahrul Kirom

Dosen STAI Khozinatul Ulum Blora, Jawa Tengah, Alumnus Program Master Filsafat, Fakultas Filsafat, UGM, Yogyakarta. Alamat Rumah: Jl. Pabrik Migas No. 12 Kampung Baru Cepu Blora Jawa Tengah.

“Pancasila Dalam Bingkai Kerukunan Beragama”

Jurnal Dialog Vol.36, No.2, November 2012. hal: 45

Syaripulloh

Pengajar FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

“Penanggulangan Kemiskinan”

Jurnal Dialog Vol.36, No.2, November 2012. hal: 95

KETENTUAN PENULISAN

1. Naskah yang dimuat dalam jurnal ini berupa pemikiran dan hasil penelitian yang menyangkut masalah sosial dan keagamaan. Naskah belum pernah dimuat atau diterbitkan di media lain.
2. Naskah tulisan berisi sekitar 15-20 halaman dengan 1,5 (satu setengah) spasi, kertas kuarto (A 4),
3. Abstrak dan kata kunci dibuat dalam dwibahasa (Inggris dan Indonesia),
4. Jenis huruf latin untuk penulisan teks adalah Palatino Linotype ukuran 12 dan ukuran 10 untuk catatan kaki,
5. Jenis huruf Arab untuk penulisan teks adalah Arabic Transparent atau Traditional Arabic ukuran 16 untuk teks dan ukuran 12 untuk catatan kaki,
6. Penulisan kutipan (*footnote*) dan bibliografi berpedoman pada Model Chicago

Contoh:

Buku (monograf)

Kuntowijoyo.1998. *Paradigma Islam, Intre-pretasi untuk Aksi*. Mizan: Ban-dung.

Artikel (Jurnal)

Wilcox, Rhonda V. 1991. Shifting roles and synthetic women in Star Trek: The Next Generation. *Studies in Popular Culture* 13(2): 53:65.

Situs web

Lynch, Tim. 1996. Review of DS 9 trials and tribble-ations. Psi-Phi: Bradley's Science Fiction Club. [Http://www.Bradley.edu/campusorg/psiphi/DS9/ep/503r.html](http://www.Bradley.edu/campusorg/psiphi/DS9/ep/503r.html) (accessed October 8, 1997).

7. Transliterasi berpedoman pada pedoman transliterasi Library of Congress,
8. Artikel pemikiran memuat judul, nama penulis, alamat instansi, email, abstrak, kata kunci, dan isi. Isi artikel mempunyai struktur dan sistematika serta persentasenya dari jumlah halaman sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan (10%)
 - b. Isi Pemikiran dan pembahasan serta pengembangan teori/konsep (70%)
 - c. Penutup (20%)
9. Artikel hasil penelitian memuat judul, nama penulis, alamat instansi, email, abstrak, kata kunci, dan isi. Isi artikel mempunyai struktur dan sistematika serta presentase jumlah halaman sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan meliputi latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penelitian (10%)
 - b. Kajian Literatur mencakup kajian teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan (15%).
 - c. Metode Penelitian yang berisi rancangan/model, sampel dan data, tempat dan waktu, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data (10%).
 - d. Hasil Penelitian dan Pembahasan (50%).
 - e. Penutup yang berisi simpulan dan saran (15%).
 - f. Daftar Pustaka
10. Pemuatan atau penolakan naskah akan diberitahukan secara tertulis/email. Naskah yang tidak dimuat tidak akan dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis.

Contact Person:

Dr. H. Susari, M.A. (Redaktur Eksekutif)

HP: 0821 141 70501

Naskah diemail ke:

jurnaldialog@yahoo.com

soesary@yahoo.com